



## **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

**Cut Melinda Ali<sup>1</sup>, Zulkifli Boku<sup>2</sup>, Usman<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

Email: [cutmelindaali50@gmail.com](mailto:cutmelindaali50@gmail.com)<sup>1</sup>. [kzul90@yahoo.co.id](mailto:kzul90@yahoo.co.id)<sup>2</sup>. [usmanpattiwi@gmail.com](mailto:usmanpattiwi@gmail.com)<sup>3</sup>

### **INFO ARTIKEL**

#### **Riwayat Artikel:**

Received: 17 Desember 2023

Revised: 4 Februari 2023

Accepted: 10 Februari 2023

#### **Kata Kunci:**

Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi Akuntansi, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

#### **Keywords:**

Internal Control System, Accounting Information System, Village Fund Management Accountability

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada aparat desa Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan 1) sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, 2) sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, dan 3) secara simultan sistem pengendalian intern dan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

### **ABSTRACT**

The recent research aimed to figure out the effect of the internal control system and Accounting information system on village fund management accountability. The research method employed a quantitative method with a descriptive quantitative approach. Additionally, the data used in this research were primary data obtained by scattering questionnaires to village apparatus throughout Tolangohula Subdistrict, Gorontalo Regency. The Findings denoted that 1) the internal control system positively and significantly affected village fund management accountability, 2) the accounting information system positively and significantly affected the village fund management accountability, and 3) simultaneously the internal control system and accounting information system positively and significantly affected village fund management accountability.

---

@2023 Cut Melinda Ali, Zulkifli Boku, Usman  
Under The License CC BY-SA 4.0

---

## **PENDAHULUAN**

Perhatian pada desa yang ada di Indonesia mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir. Hal ini berlangsung karena adanya peraturan pemerintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hal ini dapat memberikan peluang untuk

desa agar dapat mengelola secara independen dana desa dan kemudian dapat mengembangkan potensinya guna untuk meningkatkan kapasitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa. Pemerintah Desa merupakan tingkat pemerintahan terkecil yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Sementara itu, Pemerintah desa juga dapat membantu pemerintah pusat untuk melakukan pelayanan publik, pembangunan dan pemberdayaan kepada masyarakat secara langsung.

Desa merupakan pelaksanaan suatu geografis yang dapat ditimbulkan oleh unsur-unsur sosial, ekonomi politik, dan cultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain Fadil ( 2020). Kemudian dalam melakukan kegiatannya memerlukan pengawalan, maka dari itu pemerintah bersama dengan legislative mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa, maka pemerintah desa mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahanya secara keseluruhan dan bertanggungjawab.

Berdasarkan dalam sistem pembangunan desa yang akan dilaksanakan diwujudkan dalam lingkungan desa yang harus sesuai dengan adanya masalah yang akan terjadi. Sehingga masyarakat yang berada pada lingkungan desa tersebut akan dapat menyampaikan cita-cita atau harapan serta menjadikan sebuah prioritas yang dapat menuju pembangunan pedesaan yang lebih baik. Hal ini yang dapat melahirkan protes baru tentang Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan suatu anggaran keuangan yang diberikan oleh pemerintah untuk desa yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah serta diperoleh dari dana perimbangan keuangan pusat. Sebagai halnya yang dimaksud pada ayat (1) tentang Alokasi Dana Desa (ADD) paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh kota/kabupaten dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) selepas dikurangi dengan dana alokasi khusus. Kemudian dengan bergulirnya dana perimbangan yang melalui (ADD) Alokasi Dana Desa yang mengharuskan desa menjadi sejahtera. Selanjutnya setiap desa berkewajiban untuk mempunyai kewenangan serta mengatur kemampuannya sendiri serta masyarakat yang memiliki potensi untuk mencapai halnya tujuan yang termasuk dalam mensejahterakan dan pemerataan kemampuan ekonomi. (Rahmawati 2021)

Terkait dengan adanya akuntabilitas ditemukan masalah yang berada dalam pemerintah Desa Di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo masih belum maksimal dalam melakukan pertanggungjawaban. Hal tersebut dikarenakan masyarakat masih belum mengetahui seutuhnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban tersebut. Dimana setiap pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak diketahui sama sekali oleh masyarakat dan hal ini menimbulkan suatu stigma negatif bagi masyarakat mengenai penyimpangan yang ditimbulkan oleh pemerintah desa.

Dilihat dari sisi SPI masalah yang ditemukan di desa yang ada dikecamatan Tolangohula yaitu dimana akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tolangohula masih rendah dikarenanakan SDM nya yang masih lemah, dimana pengelolaan dana desa belum dikelola dengan baik oleh bendahara yang tidak cukup berpengalaman karena pendidikan yang masih dibilang dibawah.

Dilihat dari sisi SIA masalah yang ditemukan yaitu terkait dengan pelaksanaan ABDesa bahwa banyak masyarakat yang tidak mengetahui terkait dengan pelaksanaan ABDesa khususnya mengenai realisasi anggaran yang direalisasikan. Masyarakat tidak mendapatkan informasi yang akurat dan transparan terkait dengan pelaksanaan ABDesa di Kecamatan Tolangohula. Disamping kurangnya transparansi pelaksanaan ABDesa, aparatur pemerintah desa masih kurang paham tentang penggunaan sistem informasi akuntansi dalam memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan APBDesa. Kurang pemahannya aparatur Pemerintah Desa tersebut berimbas kepada terjadinya kesulitan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa yang dapat dibuktikan dengan adanya keterlambatan dalam menyiapkan laporan pelaksanaan APBDesa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang telah dilakukan kepada Bendahara Kecamatan Tolangohula Surino Jabi (2021) pada saat observasi menyatakan bahwa keterlambatan pencairan dana desa yang ada di Kecamatan Tolangohula sering terjadi keterlambatan diakibatkan beberapa faktor diantaranya; sumber daya manusia yang masih rendah dan transparansi setiap penggunaan anggaran belum sepenuhnya terbuka. Sumber manusia yang masih rendah permasalahan tersebut juga sering terjadi di beberapa daerah seperti hasil penelitian yang diungkapkan oleh Asmawati & Basuki (2020) yang melakukan penelitian di desa Dore yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat akuntabilitas pemerintah di desa Dore masih dinilai rendah dikarenakan faktor Sumber Daya Manusia yang belum optimal. Kemampuan sumber daya aparatur desa yang tidak optimal ini dikarenakan indikasi dengan ketidakmampuan menyelenggarakan penatausahaan dana desa yang mengakibatkan tumpangtindih tugas dan wewenang deskripsi tugas. Sehingga, hal tersebut yang dapat menyebabkan keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban dana desa. Ketika diamati dengan jelas dimana aparat desa kurang transparan dalam melaksanakan program kegiatan dana desa. banyak kegiatan/program yang dilakukan oleh desa masih menggunakan biaya yang bersumber dari dana desa yang tidak dilengkapi kuitansi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Selain itu berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran yang seharusnya dicatat pada buku bank sesuai aturan yang berlaku, akan tetapi dari pemerintah desa Dore yang diwakilkan oleh bendahara desa tidak dapat memanfaatkan buku bank sesuai dengan fungsinya. Sama halnya Penelitian yang dilakukan oleh Sri Ayu Saputri, Nurzi Sebrina, dan Vita Fitria Sari (2019) menunjukkan bahwa akuntabilitas penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa yang terdapat pada desa yang ada di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman yang terdapat 4 desa, yakni; Desa Katapiang, Desa Kasang, Desa Sungai Buluh dan Desa Buayan Lubung Alung. Pada 4 desa tersebut, terdapat permasalahan terkait dengan adanya keterlambatan dalam menyelesaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan (LRP) APBDes dan di saat membuat Laporan Realisasi anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) yang dimana peraturan Bupati Padang Pariaman yang lambat keluar. Sementara itu, dana desa tidak akan cair jika salah satu desa tidak menyelesaikan laporan realisasi APBDes sehingga mengakibatkan keterlambatan pencairan dana desa dan terganggunya proses pelayanan serta tertundanya pekerjaan fisik yang sudah direncanakan. Ketidak sinkronan regulasi ini mengakibatkan keterlambatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas.

Dengan adanya permasalahan ini, beberapa variabel yang perlu digunakan untuk memperbaiki pengelolaan dana desa tersebut diantaranya sistem pengendalian intern. Dimana pengendalian intern merupakan suatu proses yang dapat dipengaruhi oleh sistem teknologi informasi dan sumber daya manusia yang dirancang untuk dapat membantu organisasi mencapai tujuan tertentu Sri Ayu Saputri, Nurzi Sebrina, dan Vita Fitria Sari (2019) dan menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commision (COSO)* mendefinisikan bahwa pengendalian internal merupakan instrument terpenting yang dapat menyediakan jaminan yang layak (*reasonable assurance*) mengenai pencapaian atas tujuan dari kategori tertentu.

Pengendalian internal harus dilaksanakan secara efektif dalam suatu perusahaan untuk mencegah dan menghindari terjadinya kesalahan, kecurangan dan penyelewengan. Demikian pula variabel Sistem Informasi Akuntansi dapat digunakan untuk mengelola dana desa. Sistem informasi akuntansi adalah sekumpulan komponen informasi yang digunakan untuk suatu intern organisasi. Hal ini karena adanya SIA yang telah mempermudah adanya sumber daya alam untuk memperoleh informasi terkait ekonomi organisasi (Sri Ayu Saputri, Nurzi Sebrina, dan Vita Fitria Sari 2019).

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Teori Stewardship (*Stewardship Theory*)**

*Stewardship Theory* Menurut Donaldson & Davis (1989) merupakan suatu yang menggambarkan keadaan dimana seorang manajer lebih mengutamakan kepentingan organisasi untuk tujuan utamanya bukan termotivasi terhadap kepentingan individu. *Theory Stewardship* didasari atas teori psikologis serta sosiologi pemikir akuntansi manajemen. *Theory Stewership* memberikan sebuah asumsi filosofi dari sifat manusia yaitu dapat dipercaya, bertanggung jawab, jujur serta memiliki integritas atas setiap aktifitas yang dilakukannya. Berdasarkan *Theory Stewership* menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Keberhasilan suatu organisasi dapat dicapai dengan cara memaksimalkan utilitas *steward* dan *principal*. Teori ini memandang steward (pemerintah) sebagai pihak yang mampu melaksanakan kegiatan yang sebaik-baiknya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan principal (masyarakat). Konsep teori ini berdasarkan atas kepercayaan pada pihak yang diberikan wewenang, dimana manajemen dalam suatu organisasi dicerminkan sebagai *good steward* yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasannya dengan penuh tanggungjawab, melainkan lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan principal. Hal ini menghindarkan adanya konflik kepentingan antara steward dengan principal yang menjalankan fungsi eksekutif organisasi.

### **Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (2000) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sasaran pertanggungjawaban adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, pengeluaran oleh instansi pemerintah. Akuntabilitas dapat terwujud apabila terdapat komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah yang bersangkutan untuk menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Mardiasmo (2002:20) Akuntabilitas adalah suatu kewajiban yang memegang amanah untuk memberikan tanggungjawab, melaporkan, meyakinkan serta mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang akan menjadi pertanggungjawaban pada pihak yang memberi amanah yang mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Menurut Ni Kadek Desi Pilianti & Ni Ketut Rasmini (2021) Akuntabilitas merupakan alat untuk meminimalkan kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan adanya kepercayaan publik.

Menurut Puspa & Prasetyo (2020) menjelaskan akuntabilitas adalah salah satu prinsip yang penting untuk diwujudkan dalam pengelolaan keuangan suatu entitas baik pemerintah maupun bisnis. Akuntabilitas merupakan salah satu bentuk pengelolaan keuangan sebagai salah satu pilar yang utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Vilmia Farida, A. Waluya Jati, Riska Harventy (2018) Akuntabilitas adalah prinsip yang harus berada dalam pemerintahan, baik dari pemerintahan yang terbesar ataupun yang terkecil yang disebut sebagai pemerintah desa. Sementara itu, sebuah pemerintahan akan dikatakan baik jika masyarakatnya sejahtera dan kesejahteraannya dilihat dari unit yang terkecil yaitu desa. Akuntabilitas juga merupakan suatu penyampaian informasi administrasi keuangan yang adil, merata, dan transparan pada pihak yang benar-benar membutuhkan termaksud publik. Yenty Astari Dewi, Nasfi, & Mai Yuiza (2021).

### **Sistem Pengendalian Intern**

Pengendalian internal menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)* mendefinisikan bahwa pengendalian internal merupakan instrument terpenting yang dapat menyediakan jaminan yang layak (*reasonable assurance*) mengenai pencapaian atas tujuan dari kategori tertentu. Pengendalian internal harus dilaksanakan secara efektif dalam suatu perusahaan untuk mencegah dan menghindari terjadinya kesalahan, kecurangan dan penyelewengan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kerangka pengendalian atas sistem yang sudah ada pada perusahaan yang terdiri dari berbagai tindakan pengendalian atas sistem yang sudah ada pada perusahaan yang bersifat interen bagi perusahaan, sehingga menejer dapat memberikan keyakinan kepada pimpinan bahwa tujuan perusahaan telah tercapai. Sistem pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah “adalah suatu proses yang diciptakan manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah”. Pengendalian internal juga memberikan suatu jaminan yang wajar bahwa; (a). informasi bisnis akurat, (b). aktiva dilindungi dan digunakan untuk pencapaian tujuan usaha, (c). karyawan mematuhi peraturan dan ketentuan. Feriyanto & Hadian (2014)

Menurut Karyadi (2019) Pengendalian Intern adalah proses yang di rancang untuk memberikan jaminan tercapainya tujuan yang berkaitan dengan efektifitas dan efisien operasi, reliabilitas pelaporan keuangan, dan ketaatan hukum yang berlaku. Para manajer harus mampu menilai sistem internal karena mereka bertanggung jawab atas pengendalian internal pelaporan keuangan baik swasta maupun instansi pemerintah. Perancang sistem juga penting untuk memahami pengendalian intrnal, karena mereka harus menilai resiko perusahaan tidak dapat mencapai tujuan perusahaan serta menerapkan serta menerapkan pengendalian internal yang dapat menurunkan risiko tersebut. Sistem pengendalian internal menurut Siska Wahyuni, Novita Indrawati, dan Al Azhar L (2018) adalah sebagai suatu proses yang dapat dipengaruhi oleh sistem teknologi informasi dan sumber daya manusia yang dirancang untuk dapat membantu organisasi mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Krismiaji (2010:4) menjelaskan sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang memproses sebuah data dan transaksi untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat guna mengendalikan, merencanakan dan mengoperasikan bisnis.

Pengendalian internal merupakan suatu kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan adanya keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi untuk mencapai tujuan dan sasarnya. Rai, (2008). Pengendalian internal diterapkan untuk mencapai tujuan dan meminimalkan hal-hal yang mungkin terjadi diluar rencana, pengendalian internal juga dapat meningkatkan efisiensi, mencegah timbulnya kerugian atas aktiva, mempertinggi tingkat keandalan data dalam laporan keuangan dan mendorong dipatuhinya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan. Jadi pada dasarnya pengendalian internal merupakan tindakan yang bersifat aktif, karena mencari tindakan perbaikan apabila terjadi hal-hal yang menyimpang dari apa yang ditetapkan.

### **Sistem Informasi Akuntansi**

Pemahaman akan adanya teknologi informasi telah menjadi pusat kepentingan seseorang yang bekerja di instansi pemerintahan. Selain itu yang akan menjadi modal utama untuk bersaing di era globalisasi yaitu pengetahuan akan adanya teknologi informasi. Untuk menciptakan aturan pemerintah yang lebih baik dapat dimulai dengan cara mengawasi proses perencanaan dan penganggaran yang dapat melibatkan peran aktif masyarakat. Sebagai pihak yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan desa. Maka dari itu diperlukan peningkatan kapasitas agar mampu menyandingkan sistem pendukung keputusan yang berbasis pada data untuk meningkatkan keahlian berakuntansi, yaitu dengan cara mengelola media sebagai bahan publikasi informasi. Dengan adanya pembuatan dan penggunaan sistem yang dimaksud untuk mempermudah pemerintah desa untuk mengatur serta dapat mengendalikan data yang banyak, menjaga konsistensi dan meminimalisir kesalahan antar proses.

Selain itu, Desa akan mempunyai sumber pendapatan berupa; (a) Pendapatan Asli Daerah, (b) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, (c) bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

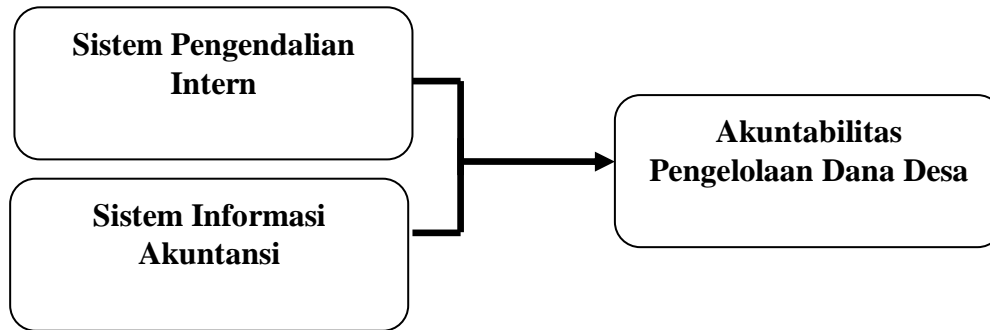
Selain itu dengan adanya tambahan dana desa diharapkan pemerintah desa mampu membangun, memberdayakan serta mensejahterkan desa. (Fadil 2020)

Menurut Krismiaji (2010:4) menjelaskan sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang memproses sebuah data dan transaksi untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat guna mengendalikan, merencanakan dan mengoperasikan bisnis. Sedangkan Baridwan (2013:4). menurut .Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan suatu komponen institusi yang menggolongkan, mengumpulkan, menghasilkan dan mengkomunikasikan informasi keuangan yang relevan untuk adanya keputusan pada pihak-pihak luar seperti; investor, kreditor, dan inpeksi pajak. Kemudian pihak-pihak dalam terutama manajemen Menurut Triana (2020) sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang didalamnya terdapat pengumpulan, pencatatan dan pengolahan data agar menghasilkan informasi bagi pengambilan keputusan. Sementara itu, sistem informasi akuntansi meliputi; (a) orang, (b) prosedur dan intruksi, (c) data, (d) perangkat lunak, (e) infrastruktur teknologi informasi, (f) pengendalian internal dan (g) ukuran keamanan. Sedangkan menurut Eni Srihastuti, Imarotus Suaidah, dan Siti Isnaniati (2021) Sistem informasi akuntansi adalah sekumpulan komponen informasi yang digunakan untuk suatu intern organisasi. Hal ini karena adanya SIA telah mempermudah adanya Sumber Daya Alam (SDM) untuk memperoleh informasi terkait ekonomi organisasi. Sarosa (2009:13) juga menyatakan sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem mengumpulkan, mencatat, memproses dan menyimpan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang berguna dalam membuat suatu keputusan.

Dari beberapa penjelasan yang dapat disimpulkan penulis, Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan suatu organisasi yang berasal dari formulir, pencatatan, dan laporan yang terkoordinir dan untuk menciptakan suatu dasar informasi tertentu yang diperlukan untuk dapat membantu manajemen perusahaan.

Penelitian ini berfokus kepada kinerja pemerintah daerah yang bersifat kasuistik. Jenis penelitian yang digunakan untuk mengungkap setiap fenomena yang terjadi melalui penelitian kuantitatif. Untuk menjawab hipotesis maka peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap variabel Sistem Pengendalian Intern ( $X_1$ ) dan Variabel Sistem Informasi Akuntansi ( $X_2$ ) Terhadap Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ( $Y$ ). Hasil dari validitas dan reliabilitas dilanjutkan dengan analisis regresi sederhana dengan melihat pengaruh diantara 2 Variabel. Keadaan ini sesuai dengan kehendak (Creswell, 2016) dan (Sugiyono, 2019) bahwa analisis kausal dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh terhadap suatu variabel dengan variabel yang lain. Fokus pada variabel sistem pengendalian internal disebabkan beberapa penelitian sebelumnya menekankan bahwa variabel ini sangat menentukan di dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, walaupun sebagian yang lain mengatakan bahwa kurang berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka desain penelitian dalam penelitian ini yang dibuat berdasarkan beberapa teori dan konsep kinerja pemerintah daerah yang dianggap bahwa sangat menentukan kinerja pemerintah daerah. Hal tersebut dapat dilihat dalam gambar 1.1 berikut.

**Gambar 1.**  
**Desain Penelitian**



### **Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis penelitian dapat juga diartikan sebagai jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris.

H1 : Diduga terdapat pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

H2 : Diduga terdapat pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

H3 : Diduga terdapat pengaruh sistem pengendalian intern dan sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

### **METODE PENELITIAN**

#### **Populasi**

Radjab dan Jam'an (2017: 99) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan dengan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Aparatur desa di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo yang terdapat 15 desa dan setiap desa berjumlah 11 orang, Jadi jumlah keseluruhannya adalah 165 orang. Selain Aparatur desa terdapat juga BPD sebagai populasi dalam penelitian ini. Berikut ini adalah nama desa di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo.

#### **Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah data karakteristik yang dimiliki oleh populasi tertentu. Sampel yang dipilih harus sesuai kriteria yang ditentukan untuk mendapatkan data yang maksimal Sugiyono (2017). Kemudian dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *purposive sampling*. Metode ini digunakan untuk memperoleh sampel sesuai dengan kriteria yang ditentukan peneliti, dimana dalam penelitian ini sampel yang diambil di masing-masing desa berjumlah 4 orang yaitu: Kepala desa, Sekretaris Desa, Kaur Kaungan dan BPD. Adapun kriteria dalam pengambilan sampel ini yaitu :

1. Kepala Desa yang menjabat 3 Tahun terakhir
2. Sekretaris Desa yang menjabat 3 Tahun terakhir
3. Bendahara Desa yang menjabat 3 Tahun terakhir
4. BPD yang menjabat 3 Tahun terakhir

Sehingga, sampel dalam penelitian ini adalah 60 orang berdasarkan kriteria di atas.

**ANALISIS PEMBAHASAN**

Berdasarkan data yang diperoleh melalui kuesioner yang telah ditabulasi dan dianalisis berdasarkan SPSS, maka diperoleh hasil analisis validitas terhadap variabel Sistem Pengendalian Intern (SPI). Dari 10 item pernyataan, maka dinyatakan bahwa semua item valid karena T-Hitung > daripada T-tabel.

**1. Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Intern (X1)**

Berdasarkan hasil analisis yang ada pada tabel analisis SPI yaitu semua item pernyataan pada variabel Sistem Pengendalian Intern (X1) dinyatakan valid dimana hasil uji  $r_{\text{Hitung}}$  masing-masing pernyataan lebih besar dari  $r_{\text{Tabel}}$  0,250. Dengan demikian dapat dikatakan memenuhi uji validitas dan digunakan untuk pengumpulan data penelitian.

**2. Uji Validitas Variabel Sistem Informasi Akuntansi (X2)**

Berdasarkan hasil analisis yang ada pada tabel analisis Sistem Informasi Akuntansi yaitu semua item pernyataan pada variabel Sistem Informasi Akuntansi (X2) dinyatakan valid dimana hasil uji  $r_{\text{Hitung}}$  masing-masing pernyataan lebih besar dari  $r_{\text{Tabel}}$  0,250. Dengan demikian dapat dikatakan memenuhi uji validitas dan digunakan untuk pengumpulan data penelitian.

**3. Uji Validitas Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)**

Berdasarkan hasil analisis yang ada pada tabel analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yaitu semua item pernyataan pada variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) dinyatakan valid dimana hasil uji  $r_{\text{Hitung}}$  masing-masing pernyataan lebih besar dari  $r_{\text{Tabel}}$  0,250. Dengan demikian dapat dikatakan memenuhi uji validitas dan digunakan untuk pengumpulan data penelitian.

**Tabel Hasil Uji Analisis Regresi**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.017	3.457		.584	.562
Sistem Pengendalian Intern	.418	.191	.319	2.196	.032
Sistem Informasi Akuntansi	.717	.238	.438	3.008	.004

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Data Olahan SPSS, 2022

Berdasarkan hasil analisis diatas, model regresi linear berganda adalah sebagai berikut.

$$\hat{Y} = 2,017 + 0,418X1 + 0,717X2 + e$$

Berdasarkan model persamaan regresi tersebut, maka dapat diinterpretasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta sebesar 2,017 menunjukkan nilai rata-rata variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebesar 2,017 dengan ketentuan nilai variabel Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Informasi Akuntansi bernilai konstan atau ceteris paribus.
- b. Nilai Koefisien Regresi Variabel X1 (Sistem Pengendalian Intern) sebesar 0,418 atau sebesar 41,8% menunjukkan setiap perubahan variabel Sistem Pengendalian Intern sebesar satu persen maka akan meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tolangohula sebesar 41,8%.
- c. Nilai Koefisien Regresi Variabel X2 (Sistem Informasi Akuntansi) sebesar 0,717 atau sebesar 71,7% menunjukkan setiap perubahan variabel Sistem Informasi Akuntansi sebesar satu persen maka akan meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tolangohula sebesar 71,7%.

### **Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Pemerintah Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Pemerintah Desa berfungsi sebagai ujung tombak di dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang baik dibidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan maupun tugas-tugas pembantuan yang merupakan pembangunan integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Peran besar yang diterima oleh Desa tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh Karena itu pemerintah Desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah Desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan. Untuk mendukung akuntabilitas dana desa yang dikelola oleh Pemerintah desa, Pemerintah pusat selaku principal melalui Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan telah merilis sistem informasi akuntansi berbasis aplikasi dengan nama SISKEUDES (Sistem Informasi Keuangan Desa). Tujuan dari diciptakannya SISKEUDES ialah guna memberikan bantuan dalam meningkatkan akuntabilitas Pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Kesuksesan SISKEUDES dari sisi *Information Quality* dan *Service Quality* telah mampu mendukung kepuasan penggunaanya dalam membuat laporan keuangan (Pratama &

Amalia, 2019). Penggunaan sistem informasi akuntansi dimaksudkan memudahkan untuk mengatur, mengendalikan data yang banyak, meminimalisir kesalahan dan menjaga konsistensi dalam proses.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo. koefisien positif dalam hasil penelitian ini mengartikan bahwa dengan semakin baik penggunaan sistem informasi akuntansi maka akan meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Adapun nilai koefisien dalam penelitian ini yaitu sebesar 71,7% yang berarti bahwa dengan pemanfaatan sistem informasi akuntansi satu persen maka akan meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebesar 71,1%. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa diduga sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa **diterima**.

Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Nugraha dan Astuti (2013) bahwa dengan adanya pengaplikasian Sistem Informasi Akuntansi telah mempermudah kegiatan mengenai pelaporan dengan sangat baik sehingga telah mencapai tingkat akuntabilitas yang maksimal. Semakin baik penerapan sistem informasi akuntansi, maka akan semakin tinggi pula Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang dihasilkan oleh aparatur pemerintahan desa. Begitu pula sebaliknya, semakin buruk penerapan sistem informasi akuntansi maka Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang dihasilkan oleh aparatur pemerintahan desa akan menjadi makin kurang.

### **Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Pemerintah Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Pemerintah Desa berfungsi sebagai ujung tombak di dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang baik dibidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan maupun tugas-tugas pembantuan yang merupakan pembangunan integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Peran besar yang diterima oleh Desa tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh Karena itu pemerintah Desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah Desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan. Untuk mendukung akuntabilitas dana desa yang dikelola oleh Pemerintah desa, Pemerintah pusat selaku principal melalui Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan telah merilis sistem informasi akuntansi berbasis aplikasi dengan nama SISKEUDES (Sistem Informasi Keuangan Desa). Tujuan dari diciptakannya SISKEUDES ialah guna memberikan bantuan dalam meningkatkan akuntabilitas Pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Kesuksesan SISKEUDES dari sisi *Information Quality* dan *Service Quality* telah mampu mendukung kepuasan penggunaanya dalam membuat laporan keuangan (Pratama &

Amalia, 2019). Penggunaan sistem informasi akuntansi dimaksudkan memudahkan untuk mengatur, mengendalikan data yang banyak, meminimalisir kesalahan dan menjaga konsistensi dalam proses.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo. koefisien positif dalam hasil penelitian ini mengartikan bahwa dengan semakin baik penggunaan sistem informasi akuntansi maka akan meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Adapun nilai koefisien dalam penelitian ini yaitu sebesar 71,7% yang berarti bahwa dengan pemanfaatan sistem informasi akuntansi satu persen maka akan meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebesar 71,1%. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa diduga sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa diterima.

### **Pengaruh Simultan Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa secara simultan Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai  $F_{\text{hitung}}$  29,516 yang berarti lebih besar dari nilai  $F_{\text{tabel}}$  3,16. dengan nilai probabilitas yang diperoleh dari pengujian lebih kecil dari nilai alpha 0,05.

Al-Zwyalif (2015) mengemukakan bahwa pengendalian internal memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan pilar *corporate governance* dan keberhasilan *corporate governance* membutuhkan kepatuhan terhadap seluruh unsur pengendalian internal. Kemudian Nurillah (2014) menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Jika sebuah organisasi mempunyai sistem pengendalian internal yang baik, maka organisasi tersebut tidak akan mengalami kekacauan dalam melaksanakan tugasnya. Fungsi sistem pengendalian internal dapat membantu sumber daya manusia untuk mengetahui batasan-batasan dan hak-hak dalam bekerja serta teknologi informasi yang bisa dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan tersebut. Sehingga Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang baik dapat dicapai melalui penerapan sistem pengendalian intern dan memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat mengetahui laporan pengelolaan keuangan desa.

Kemudian Nugraha dan Astuti (2013) menjelaskan bahwa dengan adanya pengaplikasian Sistem Informasi Akuntansi telah mempermudah kegiatan mengenai pelaporan dengan sangat baik sehingga telah mencapai tingkat akuntabilitas yang maksimal. Semakin baik penerapan sistem informasi akuntansi, maka akan semakin tinggi pula Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang dihasilkan oleh aparatur pemerintahan desa. Begitu pula sebaliknya, semakin buruk penerapan sistem informasi akuntansi maka Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang dihasilkan oleh aparatur pemerintahan desa akan menjadi makin kurang.

## **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Dalam hasil penelitian hipotesis pertama menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo.
2. Hasil penelitian hipotesis kedua menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo.
3. menunjukkan bahwa secara simultan Pengendalian Intern dan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel berbeda untuk lebih mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, seperti variabel anggaran dana desa dan sistem kinerja pemerintah desa serta kualitas sumber daya manusia

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Asmawati, I., & Basuki, P. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, 23(2), 179–194.
- Azhar Susanto. (2008). Sistem Informasi Akuntansi (Edisi Perd). Lingga Jaya.
- Baridwan, Z. (2013). Sistem Informasi Akuntansi (Kedua). Salempa Empat.
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2003). *Bussiners research method internasional edition. McGraw- Hill.*
- Dewi, Y. A., Nasfi, N., & Yuliza, M. (2021). *Internal Control System, Utilization of Accounting Information Technology, on Village Fund Management Accountability. International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 5(1), 190–203.
- Enny Radjab & Andi Jam'an (2017). Metodologi penelitian bisnis.
- Fadil, M. (2020). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. In Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan di RSUD Kota Semarang. Universitas Pancasakti Tegal.
- Feriyanto, O., & Hadian, E. (2014). Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas Dan Pengendalian Intern Pengeluaran Kas: Studi Deskriptif Pada UKM di Kota Bandung. *STAR – Study & Accounting Research*, 11(1), 68–75.

- Kadek, N., Pilianti, D., & Rasmini, N. K. (2021). *Open Access The Effect of Community Participation , Competency of Employees , Utilization of Information Technology , and Internal Control Systems on Fund Accountability. American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5(3), 361–366.
- Karyadi, M. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi di Kecamatan Aikmel dan Kecamatan Lenek Tahun 2018). *Journal Ilmiah Rinjani\_ Universitas Gunung Rinjani*, 7(2)
- Krismiaji. (2010). *Sistem Informasi Akuntansi (Keempat)*. UPP AMP YPKN.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi Offset.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. In *Thesis*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah. (2006). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281–298.
- Rahmawati. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bulu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Rai, G. Agung. (2008). *Audit kinerja pada sektor publik: konsep, praktik, dan studi kasus*.
- Saputri, S. A., Sebrina, N., & Sari, V. F. (2019). Akuntabilitas Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa (Studi Kasus Desa-Desa Dalam Lingkungan Wilayah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman) Sri. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(2), 523–542.
- Sarosa, S. (2009). *Sistem Informasi Akuntansi*. Grasindo.

Srihastuti, E., Suaidah, I., & Isnaniati, S. (2021). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Terhadap Efektifitas Pelaporan Akuntansi UMKM Di Desa Banyuwang. *Mbia*, 19(3), 355–362.

Sugiyono. (2017). Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Pustaka Pelajar.

Triana, W. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Pemoderasi Sistem Pengendalian Intern Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Asahan (Vol. 4, Issue 1) [Universitas Muhammadiyah Sumatera].